



## Seleksi PPDB Siswa Miskin Didahulukan

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta akan mendahulukan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk warga miskin. Pekan ini Disdik akan menyosialisasikan dan mendata siswa miskin di setiap kelurahan.

Kepala Disdik Kota Yogyakarta Edy Hery Suasana mengatakan, seleksi bagi siswa miskin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) ini akan dimulai Juni mendatang. Sementara PPDB reguler berlangsung Juli. "Ketentuannya sama dengan tahun lalu, kuota untuk siswa pemegang KMS juga sama, 25 persen di SMP dan lima persen di SMA," kata dia, Kamis (21/5).

Menurut Edy, peraturan wali kota (perwal) sebagai landasan PPDB ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Seleksi PPDB

tahun ini pun tetap menggunakan hasil ujian nasional untuk tingkat SMP dan SMA, sementara SD diseleksi berdasarkan umur. Pelaksanaan PPDB untuk jenjang SMP dan SMA/SMK Negeri menggunakan sistem "Real Time Online" (RTO). Sedangkan pada jenjang SD Negeri, sebagian masih ada yang manual.

Pemkot Yogyakarta, kata Edy, tetap memprioritaskan siswa dalam kota untuk masuk ke sekolah negeri. Kuota siswa dalam Kota Yogyakarta pada PPDB tahun ini adalah 55 persen untuk SMP dan 65 persen SMA. Untuk kuota siswa yang berasal dari luar kota, sebesar 20 persen untuk SMP dan 30 persen untuk SMA. Sedangkan pada SMK, baik warga kota maupun luar daerah akan mendapatkan porsi yang sama.

Edy mengatakan, tahun ini ada kebijakan ketat terhadap calon peserta didik yang tercatat fa-

mili lain dalam Kartu Keluarga (KK) penduduk kota. Tanpa disertai surat pengantar dari RT dan RW setempat yang menyatakan berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KK, maka tidak akan diakui sebagai warga kota. "Hal-hal yang sifatnya teknis nanti akan diatur dalam surat keputusan (SK) kepala dinas," kata dia.

Calon peserta didik pun harus melengkapi syarat administratif. Di antaranya wajib mengantongi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), serta memiliki ijazah. Edy mengatakan, tidak akan ada toleransi bagi siswa luar daerah yang mengaku terlambat terkait penerbitan SKHUN maupun ijazah. Hal ini guna menghindari peluang bagi siswa yang hendak mendaftar dobel di tempat asalnya. "Kita tidak ada toleransi terkait SKHUN ini," ujar dia. ■ [edi. irfan fitrat](#)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005